



**Pendampingan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gugus Himpaudi
Kecamatan Montong Gading Lombok Timur**

Najamuddin^{1✉}, Sahrip², Abdul Latif³

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : najamuddinfarabi@gmail.com¹, abdlatif@gmail.com², aripganti@gmail.com³

Abstrak

Akreditasi PAUD adalah sebuah upaya penilaian dari pemerintah untuk mengukur kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh Pemerintah. Dalam menambahkan bahwa akreditasi *Helps determine if an institution meets or exceeds minimum standards of quality* (membantu menentukan apakah suatu institusi memenuhi atau melampaui standar kualitas minimum). Metode yang digunakan adalah Memberikan pelatihan dan pendampingan tentang pentingnya akreditasi dalam peningkatan mutu Pendidikan, Praktek pembuatan dokumen akreditasi dan Pendampingan guru upload dokumen di aplikasi sispena.

Kata kunci: akreditasi, PAUD, sispena, dokumen akreditasi

Abstract

Currently, the government continues to encourage PAUD institutions to apply for accreditation. Several institutions in the Montong Gading sub-district have not submitted for the reasons (1) Teachers are still unfamiliar with the use of technology related to uploading documents in SISPENa, (2) Teachers experience confusion regarding the provision of types of documents for each item of accreditation (3) Teacher's misunderstanding of the document format for each item of accreditation. This community service activity is carried out in institutions that are members of HIMPAUDI, kec. Montong Gading, Kab. East Lombok, which combines theory and practice. The goal is to help the level of achievement of PAUD institutions that have been accredited. The result is a common perception about accreditation, ready for accreditation documents, and uploading documents at Sispena.

Keywords: accreditation, PAUD, sispena, accreditation document

Copyright (c) 2022 Najamuddin, Sahrip, Abdul Latif

✉ Corresponding author

Address : Universitas Hamzanwadi

Email : najamuddinfarabi@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.551>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Akreditasi belakangan ini banyak diperbincangkan bagi para guru baik dalam forum resmi maupun nonformal. Isu akreditasi ternyata membuat para guru kaget dan takut dengan persiapannya yang menyita waktu, tenaga dan biaya. Alasan ketakutannya karena akreditasi adalah hal yang sangat menentukan mutu atau kualitas lembaganya, sehingga harus bersiap untuk kerja lembur. Kerja keras untuk mempersiapkan berkas/ dokumen yang jumlahnya tidak sedikit dalam rentang 2 tahun terakhir. Ditambah lagi sarana serta prasarana harus dilengkapi supaya ketika asesor akreditasi datang dapat terkesan.

Lembaga PAUD termasuk satuan pendidikan yang terkena kebijakan untuk segera melakukan akreditasi. Mulai dari Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Kanak-Kanak (TK). Seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa seluruh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia harus terakreditasi pada 2019. Muhadjir Effendy dalam Rakornas BAP PAUD dan PNF di Yogyakarta juga berpesan akan pentingnya PAUD sebagai landasan dari Pendidikan “ Pendidikan PAUD merupakan landasan dari pendidikan, (Haryani and Qalbi 2004) sehingga sebagai landasan itu sangat penting karena menentukan keberlanjutan pendidikan selanjutnya.

Sehingga sebagai pemangku kepentingan itu (keberadaan) pendidikan anak usia dini adalah benar- benar penting. Semoga rakor ini bisa menghasilkan pembahasan bagi program dan strategi layanan akreditasi yang berkualitas.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Sisdiknas 2003) mencantumkan Pendidikan Nonformal sebagai salah satu jalur Pendidikan dan diperlakukan setara dengan Pendidikan Formal. Hal tersebut mempunyai konsekwensi pemberlakuan penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF), sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ((Indonesia 2015) PP RI no. 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan ke dua dari PP RI no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 tentang BAN PAUD dan PNF.

Akreditasi PAUD adalah sebuah upaya penilaian dari pemerintah untuk mengukur kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh Pemerintah. Dalam menambahkan bahwa akreditasi *Helps determine if an institution meets or exceeds minimum standards of quality* (Diaz Segismundo 2017) (membantu menentukan apakah suatu institusi memenuhi atau melampaui standar kualitas minimum). Mengukur mutu atau kualitas pendidikan sesuai yang dipersyaratkan dalam 8 standar akreditasi. Diantaranya (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana,

(6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Akreditasi memberikan dorongan dalam peningkatan mutu lembaga. Seperti halnya dalam tulisan Fithri Radhiyatul dan Wewen (Radhiyatul Fithri1, 2008) yang bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Mutu Sekolah TK Melalui akreditasi se-kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Hasilnya adalah minimnya sosialisasi tentang akreditasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya sumberdaya manusia dan biaya operasional menjadikan mutu pendidikan juga rendah. Pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dilakukan oleh BAN PAUD PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal).

Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah (Mentri agama 2005). Di dalam websitenya menyampaikan tentang manfaat akreditasi:

1. Meningkatkan mutu program dan satuan PNF;
2. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi sebagai umpan balik dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan kinerja satuan PNF;
3. Mendorong satuan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan lembaganya secara bertahap, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, propinsi, regional, nasional, bahkan internasional;
4. Memperoleh informasi dan data yang handal

dan akurat dalam rangka pelaksanaan bantuan dan program PNF yang memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Saat ini di tahun 2019 para guru PAUD sedang sibuk untuk dapat memenuhi target yang diimpikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tahun 2019 semua lembaga sudah terakreditasi. Perkumpulan guru seperti IGTKI, Himpaudi, IGRA dan lainnya ramai menggelar pelatihan, pendampingan, seminar atau workshop yang intinya untuk dapat sukses akreditasi. Adapun di dalam pelaksanaan persiapan akreditasi tersebut banyak kendala yang dialami bagi para guru maupun tenaga administrasil lembaga PAUD. Rendahnya pengetahuan tentang teknologi sebagai masalah yang banyak dialami oleh guru PAUD (Saripudin 2019). Padahal saat ini dokumen atau borang akreditasi harus di upload di dalam sistem akreditasi online yang namanya Sispena. Tidak sedikit guru yang belum *familier* dengan komputer dan jaringan internet, sehingga kebijakan tersebut serasa memberatkan. Belum lagi aktivitas untuk merubah hardfile menjadi softfile dengan cara di scan yang begitu memberatkan bagi mereka. Kendala lain adalah guru mengalami kebingungan terkait format dokumen untuk setiap butir akreditasi. Di dalam setiap butir akreditasi telah memberikan panduan berupa kisi-kisi yang tujuannya untuk mempermudah guru dalam membuatnya. Namun meskipun sudah diberi kisi-kisi guru masih bingung karena disuguhi beberapa jenis dokumen dari berbagai lembaga yang formatnya berbeda. Keadaan itu membuat guru menjadi bingung dan dampaknya adalah tidak jadi mengerjakan

dokumen akreditasi. Padahal setiap butir akreditasi tidak menuntut untuk sama formatnya yang terpenting adalah komponen/ itemnya dapat terpenuhi.

Bentuk dokumen setiap butir akreditasi belum dimengerti secara penuh oleh para guru. Misalnya tentang dokumen bukti sosialisasi visi dan misi kepada orangtua. Para guru jika ditanya hal tersebut yang diserahkan kepada asesor hanya sekedar potonya. Padahal lebih dari itu ada undangan, daftar hadir dengan paraf, notulen rapat dan foto. Permasalahan yang diuraikan sebelumnya tadi, juga dialami oleh para guru di lingkungan Kabupaten Lombok Timur khususnya yang ada diwilayah Kecamatan montong gading.

Oleh Sebab itu penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan akreditasi lembaga PAUD di HIMPAUDI kec. Montong Gading. Kegiatannya meliputi (1) Penyamaan persepsi tentang pentingnya akreditasi, (2) Penyiapan dokumen 8 standar, dan (3) Upload dokumen di Sispena. Targetnya guru PAUD diharapkan memiliki keterampilan untuk dapat menyiapkan dokumen yang memenuhi kriteria ALS (Ada, Lengkap, dan Sesuai) yang jumlahnya 60 Indikator. Serta dapat mengunggah dokumen akreditasi di aplikasi sispena. Luarannya adalah guru PAUD (1) Memiliki pemahaman tentang pentingnya akreditasi dalam peningkatan mutu lembaga, (2) dapat menyusun dokumen akreditasi 8 standar, (3) Dapat upload dokumen akreditasi pada aplikasi sispena.

METODE

Waktu dan Lokasi Kegiatan

Secara keseluruhan waktu yang digunakan dalam Pengabdian masyarakat ini direncanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Namun demikian kegiatan dilakukan 1 hari untuk masing-masing kelompok. Jumlah kelompok yang didampingi sebanyak 3 kelompok. Yang dilaksanakan di gugus himpaudi kecamatan montong gading kabupaten Lombok timur. Yang menjadi sasaran kegiatan pendampingan akreditasi adalah asesi / guru PAUD dan IGTKI se-kecamatan montong gading. Adapun target kegiatan adalah Luaran yang akan dihasilkan dalam pengabdian ini meliputi peningkatan kompetensi pengelola dan pendidik PAUD dalam menyiapkan akreditasi melalui strategi bimbingan teknis yang efektif dan efisien.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut dapat ditanggulangi melalui beberapa hal berikut, yaitu:

1. Memberikan pelatihan dan pendampingan tentang pentingnya akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan
2. Praktek pembuatan dokumen akreditasi
3. Pendampingan guru upload dokumen di aplikasi sispena

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah meliputi pelatihan dan praktik, tanya jawab, dan ceramah, Sasaran dari kegiatan ini adalah para guru PAUD dari IGTKI kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

Tahapan Kegiatan

Tahap Pendahuluan dan Sosialisasi

Tahap ini akan dipersiapkan surat ijin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan materi, alat dan bahan. Sosialisasi mengenai pelatihan persiapan akreditasi dengan menggunakan aplikasi sispena dan memberikan penjelasan terkait pembuatannya, cara mencari contoh dan penggunaan komputer.

a. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pada tahap ini pelatihan dilakukan dengan metode ceramah partisipatif, interaktif, dan dialogis. Sehingga peserta pelatihan dapat dengan mudah memahami dan menerapkannya dalam penyusunan perangkat pembelajaran mereka masing-masing. Proses pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek secara langsung.

b. Tahap Evaluasi Akhir

Evaluasi kegiatan berupa mengevaluasi kegiatan pelatihan pendampingan akreditasi dengan aplikasi sispena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Akreditasi

Akreditasi bukan hal yang perlu ditakuti dan dihindari, namun harus dilakukan. Secara umum akreditasi merupakan proses penjaminan mutu sebuah lembaga. Menurut Edward Salis (Chu et al. 2017) mutu dipandang sebagai suatu produk layanan dan harus memenuhi suatu kualifikasi tertentu yang berasal dari layanan itu sendiri. Sehingga mutu dikaji secara konsep tual memiliki dua aspek yaitu pertama, menyesuaikan diri

dengan spesifikasi, kedua memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut (Diaz Segismundo 2017) Akreditasi sebagai kegiatan penjaminan kualitas yang akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu akreditasi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan akan kelas dunia pendidikan di lingkup ASEAN. Keberadaan lembaga pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan akreditasi. Mengingat dengan label “lembaga sudah terakreditasi” memiliki nilai jual yang tinggi di mata masyarakat.

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi ini sebanyak 25 Lembaga Paud dan PNF yang hadir atas undangan dari Undangan Dari Ketua Himpaudi Kecamatan Montong gading dengan koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Dari sosialisasi ini dapat di ketahui bahwa rata-rata peserta yang tidak mengajukan akreditasi dikarenakan tidak paham akan pengisian aplikasi SISPENA dan Instrumennya serta dokumen yang harus di upload. Sosialisasi dimulai dengan pengenalan akreditasi beserta tujuannya dan di lanjutkan dengan pemaparan Aplikasi SISPENA beserta instrumennya. Peserta sebelumnya diminta membawa laptop dan kuota data untuk membuka aplikasi serta mengupload dokumen yang telah di jadikan pdf melalui aplikasi CamScanner. Untuk peserta yang tidak membawa dokumen maka akan di pandu melalui Group WA agar bisa mengajukan akreditasinya



Gambar 1. Proses Akreditasi

1. Sispena

Sispena adalah sistem penilaian akreditasi PAUD dan PNF yang berbasis online. Jadi semua proses akreditasi mulai dari pendaftaran dan penerimaan sertifikat dilakukan dengan mengunjungi *website* banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena.

Untuk syarat masuknya lembaga harus memiliki NPSN dan mengisi data Dapodik. **Sispena** merupakan kemajuan teknologi di bidang pendidikan dengan optimalisasi teknologi dan mengurangi kertas. Seperti yang diungkapkan Chu, Reynolds, Tavares, Notari, & Lee (2017) dunia pendidikan juga sedang mengalami perubahan besar terkait kualitas dan relevansi pendidikan serta penguasaan keterampilan abad ke-21 yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi.

Lembaga atau asesi yang akan mengajukan akreditasi, harus melalui beberapa tahapan yaitu (a) Pendaftaran, (b) Pengisian EDS PA (3) Penilaian EDS PA, (4) Visitasi, (5) Validasi, dan (6) Pengumuman. Sispena juga merupakan tempat untuk mengupload dokumen dokumen pengajuan akreditasi (8 standar). Selain itu asesi juga harus mengupload syarat umum dan khusus terlebih

dahulu yaitu: Syarat Umum berupa Surat Permohonan Akreditasi, Memiliki Surat Izin Operasional. Syarat Khusus: Jumlah peserta didik, Sertifikat kompetensi pendidik, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Dokumen Standar Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF adalah badan yang bertugas untuk memberikan penilaian akreditasi lembaga dengan bantuan tim asesor. Asesor terbagi ke dalam 2 kategori yaitu asesor dokumen dan lapangan. Mereka dinilai mempunyai kompetensi dan pengalaman yang lebih dalam dunia pendidikan anak usia dini. Dalam menjalankan tugas harus objektif, adil, bebas kepentingan dan tidak menerima suap.

Permendikbud Nomor 52 tahun 2015 sebagai dasar akreditasi PAUD dan Non Formal yang merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 59 tahun 2012 (Permendikbud Nomor 52 tahun 2015 2015). (BAN) PAUD dan PNF telah menyusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Terdapat 8 standar dengan 40 butir instrumen yang harus dilengkapi lembaga dalam pengajuan akreditasi. Berikut ini dokumen standar akreditasi:

A. Standar Pencapaian Perkembangan Anak

Dokumenya berupa berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, data tingkat pencapaian perkembangan anak, dan deteksi pencapaian

perkembangan anak

B. Standar Isi

Dokumen KTSP, acuan KTSP, evaluasi KTSP, dan perilaku keselamatan diri

C. Standar Proses

Dokumen yang perlu diupload adalah program semester, Rencanam pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), Rencana pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), program holistik, keterlibatan orang tua, dan pengawasan pembelajaran

D. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Dokumen yang perlu diupload adalah Ijazah, piagam pelatihan, piagam pelatihan.

E. Standar Sarana dan Prasarana

Dokumen yang perlu diupload adalah alat peraga edukatif (APE) luar dan dalam, sarana kebersihan, surat tanah, status tanah, ruangan, dan instalasi.

F. Standar Pengelolaan

Pada standar pengelolaan silahkan persiapkan dokumen-dokumen Visi Misi dan Tujuan Lembaga, RKT (Rencana Kerja Tahunan), Kaldik (Kalender Pendidikan), Struktur Organisasi, Deskripsi Tupoksi, Panduan Pelaksanaan, Layanan menurut kelompok usia, Lama belajar perhari, lama belajar perminggu, Daftar kehadiran PTK, dan Supervisi satuan.

G. Standar Pembiayaan

Pada Standar Pembiayaan, silahkan persiapkan dokumen-dokumen Keberadaan sumber pembiayaa pertahun satuan PAUD, Renacana Anggaran Penerimaan dan Belanja Satuan (RAPBS), Penyelenggaraan program pembelajaran, Pembiayaan pengembangan SDM,

Pengadaan dan Pemeliharaan saran dan prasarana, Pembiayaan pendidikan yang harus dikeluarkan untuk peserta didik, dan Pembukuan terkait pembiayaan yang dimiliki.

H. Standar Penilaian

Pada Standar Penilaian Pendidikan, silahkan persiapkan dokumen-dokumen Penilaian perkembangan anak, Penilaian harian terhadap capaian perkembangan anak, dan Laporan hasil penilaian terhadap capaian perkembangan kepada ortu peserta didik dengan frekuensi pelaporan.

Setelah mengetahui tentang jumlah standar dan butir instrumen akreditasi, lembaga (asesi) harus menyiapkan dokumen yang mendukung. Dokumen merujuk kepada setiap butir instrument akreditasi. Jadi supaya memudahkan dalam pembuatan dan penyusunannya maka dokumen dibuat sejumlah butir akreditasi (40 butir). Dokumen itu nanti sebagai bahan bagi asesor untuk melihat sejauh mana ketercapaian setiap butir instrumen akreditasi. Dokumen juga sebagai bukti yang mendukung program atau kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

3. Syarat Menyusun Dokumen Akreditasi

Dalam penyusunan dokumen menggunakan seharusnya

1. Prinsip ALS

Ada (antara dokumen dan kegiatan ada/ pernah dilakukan)

Lengkap (dokumen tersebut harus lengkap yang mencirikan /menggambarkan dokumen yang dimaksud)

Sesuai (dokumen tersebut harus sesuai dengan yang diminta oleh instrumen akreditasi)

2. Kerjakan yang ditulis

Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan di sekolah tentu mengikuti program kerja yang dibuat setiap tahunnya. Program kerja tersebut sudah ditulis dan dicanangkan setiap tahunnya, makanya harus kita lakukan sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan begitu akan mempermudah guru dalam mengidentifikasi kegiatan sekolah yang menunjang akreditasi.

3. Tulis yang dikerjakan.

Pekerjaan guru PAUD tidak lah berkutat dengan pembelajaran saja, namun banyak kegiatan yang tidak selesai apabila dikerjakan di jam sekolah. Makanya setiap aktivitas, pekerjaan, maupun rapat yang telah dilakukan harus selalu ditulis atau didokumentasikan secara rapi. Tujuannya untuk kerapian administrasi dan rujukan kegiatan tahun depan, dan menunjang akreditasi.

4. Bisa dibuktikan dan ditelusuri kegiatan yang telah ditulis dan dilakukan harus ditunjang dengan dokumentasi berupa foto atau video. Ini sebagai bukti yang kuat bilamana asesor akreditasi meminta bukti kegiatan. Cara pembuktian dan penelusuran dapat dilakukan dengan beberapa langkah:

Menempel foto dalam satu bandel laporan yaitu mulai proposal, laporan kegiatan, dokumentasi.

Menyimpan dokumentasi ke dalam file komputer dengan pemberian nama, misalnya “dokumentasi studi banding jakarta, 25 Mei 2017”.

Menyimpan file dokumentasi secara online, misalnya dengan google drive atau sejenisnya.

Sehingga sewaktu waktu bisa dibuka dimana saja.

5. Scan Dokumen

Dokumen yang ada selanjutnya discan/ dirubah menjadi *softfile* dengan ukuran maksimal 2MB yang kemudian di upload di SISPENA (sistem aplikasi akreditasi).

Adapun dampak akreditasi diantaranya, adalah:

1. Bagi lembaga

Untuk mengetahui sejauh mana mutu lembaga, atau memenuhi kriteria dari standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu karena hasil akreditasi merupakan salah satu indikator mutu (*quality indicator*) dan referensi dalam mengambil keputusan (*decision making reference*) untuk berbagai kebutuhan termasuk peningkatan mutu (*quality improvement*) pada masa yang akan datang (<https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id>).

Sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kualitas lembaga untuk periode selanjutnya.

Bentuk kepatuhan terhadap peraturan Kementrian Pendidikan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai tindak lanjut amanah konstitusi tersebut pemerintah menetapkan kebijakan mutu yang tertuang dalam (Indonesia 2015) PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijadikan dasar penetapan variabel, indikator, dan butir penilaian dalam instrumen penilaian akreditasi.

3. Bagi Masyarakat

Akreditasi mencerminkan mutu lembaga. Hasil akreditasi akan menjadi acuan masyarakat

untuk memilih lembaga sebagai mitranya. Tentunya orangtua akan memilihkan tempat il bersekolah bagi anaknya, lembaga yang memiliki akreditasi baik. Menurut Becton Loveless dalam (Ismaya, Sulaiman, and Firdiani 2021) orangtua yang menitipkan anaknya dilembaga pendidikan yang teakreditasi akan mendapatkan jaminan kualitas. Baik kualitas dari sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, dan kegiatannya.

SIMPULAN

Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen lembaga pendidikan Taman kanak-kanak Tunas Cendikia terhadap kualitas dan kapasitas pendidikan, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Sejak perencanaan sampai evaluasi dan penilaian harus dilakukan dengan standar yang sama agar penilaian memiliki standar yang sama. Akreditasi juga menjadi sebuah kegiatan penting untuk menetapkan posisi PAUD dan PNF sebagai lembaga pendidikan yang memiliki standar.

Kemudian Dari hasil sosialisasi ini dapat di simpulkan bahwa masih banyak Lembaga PAUD dan PNF belum memahami esensi dari akreditasi serta pengajuan akreditasi melalui Sispena. Hal ini di karenakan sebalum BAN PAUD dan PNF R.I. mengenalkan Sispena, proses pengajuan akreditasi menggunakan metode manual di mana lembaga mengirimkan berkas secara langsung ke Jakarta dan hal ini membuat pengelola lembaga merasa akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit mulai proses foto copy, jilid, dan pengirimannya. Setelah

mengetahi bahwa proses akreditasi sudah menggunakan metode online, maka pengelola merasa terbantu dan termotivasi untuk mengajukan akreditasi meskipun belum sepenuhnya paham akan instrument yang berada di Sispena. Untuk itu di perkukan sosialisasi berkelanjutan dan pendampingan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada penulis Dalam kegiatan pengabdian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Badan Akreditasi Nasional BAN PAUD dan PNF Propinsi NTB dan juga kepada Bapak Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok timur yang telah memfasilitasi penulis dalam memberikan pendampingan kepada Lembaga PAUD dan PNF. Serta kepada semua pengelola PAUD dan PNF kecamatan montong gading yang bersedia hadir dalam memenuhi agenda sosialisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chu, Samuel Kai Wah Et Al. 2017. 21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning: From Theory To Practice *21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning*.
- Diaz Segismundo, Maria Corazon. 2017. "Measuring Accreditation Experience: Impact On The Quality Of Education Of Selected ASAS Member-Schools In Luzon And The NCR." *International Journal Of Education And Research* 5(7). [Www.Ijern.Com](http://www.Ijern.Com).
- Haryani, Mirta, And Zahratul Qalbi. 2004. "Pemahaman Guru Paud Tentang Alat

- 190 *Pendampingan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gugus Himpaudi Kecamatan Montong Gading Lombok Timur - Najamuddin, Sahrip, Abdul Latif*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.551>
- Permainan Edukatif (Ape) Di Tk Pertiwi 1 Kota Bengkulu.” *Jurnal Educhild : Pendidikan Dan Sosial* 10(1): 6.
- Indonesia, Presiden Republik. 2015. “PP No 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan.” *Lembaran Negara RI* (1): 1–5.
- Ismaya, I, F Sulaiman, And D Firdiani. 2021. “Pembinaan Lembaga PAUD Menuju Lembaga Terakreditasi Di Kabupaten Enrekang.” *Maspul Journal* ... 3(20): 1–9.
<https://ummaspul.E-Journal.Id/Pengabdian/Article/View/2340>.
- Mentri Agama. 2005. “MENTERI AGAM A REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG.” 2.
- Permendikbud Nomor 52 Tahun 2015. 2015. “Berita Negara.” *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia* Nomor 65(879): 2004–6.
- Radhiyatul Fithri1), Wewen Anggraini2) 1)STKIP. 2008. “Peningkatan Mutu Sekolah TK Melalui Akreditasi Se-Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.” *Japanese Journal Of Allergology* 44(3): 307.
- Saripudin, Aip. 2019. “Kompetensi Guru Pendamping Paud Dalam Memenuhi Standar Layanan Paud Non Formal Di Kabupaten Tasikmalaya.” *AWLADY : Jurnal Pendidikan Anak* 5(2): 63.
- Sisdiknas, 20 TAHUN 2003. 2003. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.” *Precambrian Research* 123(1): 1689–99.
<http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Tecto.2012.06.047>
[http://Www.Geohaz.Org/News/Images/Publications/Gesi-Report With Prologue.Pdf%0Ahttp://Ec.Europa.Eu/Echo/Civil_Protection/Civil/Pdfdocs/Earthquakes_En.Pdf%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Gr.2011.06.005%0Ahttp://](http://Www.Geohaz.Org/News/Images/Publications/Gesi-Report%0Ahttp://Ec.Europa.Eu/Echo/Civil_Protection/Civil/Pdfdocs/Earthquakes_En.Pdf%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Gr.2011.06.005%0Ahttp://).